

**ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
LAMPUNG UTARA PASCA PEMEKARAN WILAYAH**

(Skripsi)

Oleh

FERI HARDANI



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2019**

ABSTRACT

ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS OF THE NORTH LAMPUNG COMMUNITY POST REGIONAL EXPANSION

**By
FERI HARDANI**

The purpose of this study was to determine the socioeconomic conditions of the people of North Lampung regency after regional expansion. This study uses secondary data obtained from government institutions such as the central statistical agency (BPS). the purpose of regional expansion is to improve the quality of public services in order to accelerate the realization of public welfare. Regional expansion is expected to bring up new centers of economic growth, be able to increase a variety of potentials that have not been explored optimally both the potential of natural resources and human resources, open the community's constraints on development and can break the chain of services that were previously concentrated in one place / The capital of the district or the capital of the sub-district, triggers the people's motivation to participate actively in the development process in order to improve their standard of living. The method used is descriptive analysis with a statistical analysis analysis tool (independent sample t-test) in this study. The results of the analysis show that there are differences between North Lampung Regency as the main district and Waykanan as the district that it has expanded.

Keywords: *Regional expansion, socioeconomic conditions*

ABSTRAK

ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG UTARA PASCA PEMEKARAN WILAYAH

Oleh

FERI HARDANI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi social ekonomi masyarakat kabupaten Lampung Utara pasca pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga pemerintahan seperti badan pusat statistic (BPS). tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru , mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka keterkungkungan masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, Metode yang di gunakan adalah dengan analisis deskriptif dengan alat analisis statistic deskripsi (*uji independent sample t-test*) dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan ada perbedaan antara Kabupaten lampung utara sebagai kabupaten induk dan waykanan sebagai kabupaten yang dimekarkannya.

Kata Kunci : Pemekaran wilayah, kondisi sosial ekonomi,

**ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT
LAMPUNG UTARA PASCA PEMEKARAN WILAYAH**

Oleh

FERI HARDANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI

Pada

Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT LAMPUNG UTARA PASCA PEMEKARAN WILAYAH**

Nama Mahasiswa : Feri Hardani

No. Pokok Mahasiswa : 1411021042

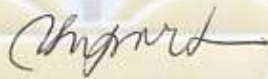
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

MENYETUJUI

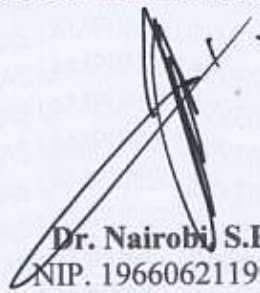
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.
NIP : 19611209 198803 1003

2. Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan



Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

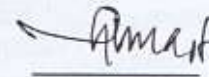
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.



Penguji I : Dr. Toto Gunarto., S.E., M.Si.



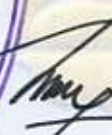
Penguji II : Dr. Arivina Ratih Yulihar T., S.E., M.M



2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si.
NIP. 196109041987031011



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 Oktober 2019

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan bukan merupakan penjiplakan hasil karya orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka, saya sanggup menerima hukuman/sanksi sesuai yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019



FERI HARDANI.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Feri Hardani dilahirkan pada tanggal 21 November 1996 di Lampung Utara. Penulis adalah anak ke enam dari enam bersaudara dari pasangan Bapak (alm) Zainal abidin dan Emak Siti Amanah.

Penulis memulai pendidikannya penddidikan formal di MIN 6 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2008. Kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 3 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis meneruskan pendidikannya di MAN 2 Lampung Utara dan lulus pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 penulis diterima di Perguruan Tinggi Universitas Lampung di Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selama masa kuliah penulis pernah aktif sebagai pengurus *Economic English Club* (EEC) 2016/2017 FEB Unila sebagai Kepala bidang III, dan terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (Himepa).

Pada semester tujuh penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Braja Harjosari , Kecamatan Braja Slebah, Kabupaten Lampung Timur selama 40 Hari sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.

MOTTO

“ Jangan menggunting dalam lipatan”

(Khanjeng Feri)

“ Hanya orang yang tidak bisa berenang yang mau menantang ombak”

(Habes Arpat)

“ Jika kamu selalu menyalahkan orang lain, maka selamanya kamu akan merasa benar”

(Dul San Abdul)

“

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbilalamin

Teriring rasa syukur kepada Allah SWT yang membimbingku hingga saat ini, karya ini kupersembahkan sebagai tanda cinta dan kasih sayang yang tulus kepada:

Emak dan Bapak , Bapak (alm) Zainal Abidin dan Emak Siti Amanah yang telah memberikan seluruh cinta dan kasih sayang, dukungan serta doa yang tiada henti untuk kesuksesanku. Terima kasih tak terhingga kepada Emak dan Bapak karena telah merawat, membesarkan, dan mendidikku tanpa lelah.

Aa dan cece yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta dukungan tiada henti disetiap prosesnya.

Seluruh keluarga, sahabat dan teman-temanku yang selalu memberikan semangat, doa, dukungan di setiap prosesnya.

Dosen-dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan motivasi, ilmu yang bermanfaat serta nasihat yang sangat membantu dan membangun.

Almamater tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Segala puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Analisis kondisi social ekonomi masyarakat Lampung Utara Pasca pemekaran wilaya” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus, penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. ALLAH SWT yang selalu memberi bantuan dan perlindungan
2. Bapak Prof. Dr. H. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing utama atas kesediaan waktunya memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, dukungan dan saran, serta motivasi luar biasanya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E.,M.Si. selaku dosen penguji I yang tidak hanya menguji namun menjadi pengarah dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Dr. Arvina Ratih, S.E., MM selaku dosen Penguji II
6. Bapak. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
7. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekertaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
8. Bapak Muhidin Sirat S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa perkuliahan.
9. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas Lampung.
10. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak, Emak yang tak pernah lelah memberikan doa tulus dan ikhlas. Terimakasih tak terhingga untuk setiap perjuangan, kasih sayang, pengorbanan serta kesabaran bapak dan emak dalam membimbing anakmu hingga saat ini.
11. Aa dan cece terimakasih atas segala nasihat dan motivasi serta dukungan secara moril maupun materil dan memberikan doa tulus untuk keberhasilanku

12. Seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Ekonomi dan yang telah banyak memberikan bantuan serta pelayanan terbaik untuk kelancaran proses penyelesaian skripsi ini.
13. Sariah Adventur, sahabat sejak awal perkuliahan, Terimakasih telah menemani selama perkuliahan, sukses selalu untuk kita semua.
14. Presidium EEC 2016/2017, Terimakasih untuk satu tahun periode kepengurusan, Terimakasih telah menjadi keluarga keduaku, dan Terimakasih atas setiap pengalaman yang telah diberikan dalam proses pendewasaan diri.
15. Kepada alien yang tidak turun kebumi, dengan tidak turunnya kalian kebumi menjadi kan saya bisa menyelesaikan skripsi dengan lancar.
16. Keluarga terhangat Komek Unila. Terimakasih atas pengalaman dan pelajaran yang diberikan, sehingga terus berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik lagi, Iman, Ilmu, Amal, Yakin Usaha Sampai.
17. Teman-teman Jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2014 yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu, terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama kita kuliah bersama.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2019
Penulis,

Feri Hardani

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Kabupaten Lampung Utara | 2 |
| 2. Otonomi Daerah | 3 |
| B. Perumusan Masalah | 14 |
| C. Batasan Masalah..... | 14 |
| D. Tujuan Penelitian | 14 |
| E. Manfaat Penelitian | 14 |
| F. Sistematika Penulisan | 15 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Kajian Pustaka..... | 16 |
| 1. Pembangunan | 16 |
| 2. Pemerintah Daerah | 17 |
| 3. Pemekaran Daerah | 20 |
| 4. Tujuan Pemekaran Daerah | 22 |
| 5. Dampak Pemekaran Daerah | 24 |
| 6. Sosial Ekonomi | 26 |
| B. Penelitian Sebelumnya | 28 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 31 |
| D. Definisi Konsep..... | 34 |
| E. Definisi Operasional..... | 35 |
| | |
| III. METODELOGI PENELITIAN | |
| A. Tipe Penelitian | 36 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| C. Jenis Data | 37 |
| 1. Data Sekunder | 37 |
| D. Definisi Operasional..... | 37 |
| 1. PDRB Perkapita | 37 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi..... | 38 |
| 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 39 |

| | |
|---|----|
| 4. Jumlah Penduduk Miskin..... | 39 |
| 5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)..... | 40 |
| E. Teknik Analisis Data..... | 42 |
| 1. Alat Analisis..... | 42 |
| 2. Statistik Deskripsi | 43 |
| 3. Uji Independent t-test..... | 43 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| A. Kondisi Ekonomi..... | 45 |
| 1. PDRB Perkapita..... | 45 |
| 2. Pertumbuhan Ekonomi | 48 |
| 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK)..... | 51 |
| 4. Penduduk Miskin..... | 55 |
| B. Kondisi Sosial | 58 |
| 1. IPM..... | 58 |
| C. Pembahasan..... | 60 |
| V. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| A. Kesimpulan | 64 |
| B. Saran..... | 64 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|---------|
| TABEL | iii |
| Tabel 1.1.PDRB Perkapita atas dasar Konstan berlaku kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018 (juta) | 11 |
| Tabel 1.2.Pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampupng Utara dan Kabupaten Way kanan tahun 2010-2018 (persen) | 12 |
| Tabel 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018 | 12 |
| Tabel 1.4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018 | 13 |
| Tabel 1.5. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 13 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|-----------|
| Gambar | iv |
| Gambar 2.1. Bagan Alir Pemikiran | 33 |
| Gambar 4.1. PDRB Perkapita atas dasar harga Konstan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 46 |
| Gambar 4.2. Statistik deskripsi PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 47 |
| Gambar 4.3. Statistik deskripsi PDRB Perkapita Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 48 |
| Gambar 4.4. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampungng Utara dan Kabupaten Way kanan tahun 2010-2018 (persen)..... | 49 |
| Gambar 4.5. Statistik deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 50 |
| Gambar 4.6. Statistik deskripsi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 51 |
| Gambar 4.7. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018 | 52 |
| Gambar 4.8. Statistik deskripsi Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 53 |
| Gambar 4.9. Statistik deskripsi Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 54 |
| Gambar 4.10. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 55 |
| Gambar 4.11. Statistik deskripsi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 56 |
| Gambar 4.12. Statistik deskripsi Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 57 |

| | |
|--|----|
| Gambar 4.13. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018..... | 58 |
| Gambar 4.14. Statistik deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 59 |
| Gambar 4.15. Statistik deskriptif Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 | 60 |

DAFTAR LAMPIRAN

| | Halaman |
|-----------------------------|---------|
| Lampiran | |
| Uji Independent t-test..... | L1 |

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Provinsi Lampung Lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 31964 yang kemudian menjadi Undang-undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan Karesidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 maret 1964 masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khasanah adat budaya di Nusantara yang tercinta ini.

Provinsi Lampung memiliki luas 35.376,50 km² dan terletak di antara 105°45'-103°48' BT dan 3°45'-6°45' LS. Daerah ini di sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia, di sebelah timur dengan Laut Jawa, di sebelah utara berbatasan dengan provinsi Sumatera Selatan, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda. Beberapa pulau termasuk dalam wilayah Provinsi Lampung, yang sebagian besar terletak di Teluk Lampung, di antaranya: Pulau Darot, Pulau Legundi, Pulau Tegal, Pulau Sebuku, Pulau Ketagian, Pulau Sebesi, Pulau Poahawang, Pulau Krakatau, Pulau Putus dan Pulau Tabuan. Ada juga

Pulau Tampang dan Pulau Pisang di yang masuk ke wilayah Kabupaten Lampung Barat.

1. Kabupaten Lampung Utara

Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Lampung, Indonesia. Kabupaten ini dulunya adalah kabupaten terluas/terbesar di Provinsi Lampung. Sejarah Lampung Utara. Pada awal masa kemerdekaan, berdasarkan UU RI Nomor 1 Tahun 1945, Lampung Utara merupakan wilayah administratif di bawah Karesidenan Lampung yang terbagi atas beberapa kawedanan, kecamatan dan marga. Pemerintahan marga dihapuskan dengan Peraturan Residen 3 Desember 1952 Nomor 153/1952 dan dibentuklah “Negeri” yang menggantikan status marga dengan pemberian hak otonomi sepenuhnya berkedudukan di bawah kecamatan. Dengan terjadinya pemekaran beberapa kecamatan, terjadilah suatu negeri di bawah beberapa kecamatan, sehingga dalam tugas pemerintahan sering terjadi benturan. Status pemerintahan negeri dan kawedanan juga dihapuskan dengan berlakunya UU RI Nomor 18 Tahun 1965.

Berdasarkan UU RI Nomor 4 (Darurat) Tahun 1965, juncto UU RI Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Sumatra Selatan, terbentuklah Kabupaten Lampung Utara di bawah Provinsi Sumatra Selatan. Dengan terbentuknya Provinsi Lampung berdasarkan UU RI Nomor 14 Tahun 1964, maka Kabupaten Lampung Utara masuk sebagai bagian dari Provinsi Lampung.

Kabupaten Lampung Utara telah mengalami tiga kali pemekaran sehingga wilayah yang semula seluas 19.368,50 km² kini tinggal 2.765,63 km².

Pemekaran wilayah pertama terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Barat berdasarkan UU RI Nomor 6 Tahun 1991, sehingga Wilayah Lampung Utara berkurang 6 kecamatan yaitu: Sumber Jaya, Balik Bukit, Belalau, Pesisir Tengah, Pesisir Selatan dan Pesisir Utara. Pemekaran kedua terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang berdasarkan UU RI Nomor 2 Tahun 1997. Wilayah Lampung Utara kembali mengalami pengurangan sebanyak 4 kecamatan yaitu: Menggala, Mesuji, Tulang Bawang Tengah dan Tulang Bawang Udik. Pemekaran ketiga terjadi dengan terbentuknya Kabupaten Way Kanan berdasarkan UURI Nomor 12 Tahun 1999. Lampung Utara kembali berkurang 6 kecamatan yaitu: Blambangan Umpu, Pakuan Ratu, Bahuga, Baradatu, Banjit dan Kasui. Kabupaten Lampung Utara, saat ini tinggal 8 kecamatan yaitu: Kotabumi, Abung Selatan, Abung Timur, Abung Barat, Sungkai Selatan, Sungkai Utara, Tanjung Raja dan Bukit Kemuning.

2. Otonomi daerah

Pelaksanaan otonomi daerah telah dimulai secara nasional pada tahun 2001, tepatnya pada tanggal 1 Januari 2001, namun secara efektif otonomi daerah baru mulai berlaku pada bulan Mei 2001 dimana baik itu daerah provinsi, kabupaten maupun kota diberikan wewenang yang luas tetapi juga bertanggung jawab dalam mengatur, membagi dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah tersebut sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi keanekaragaman daerah dimana pelaksanaan otonomi daerah ini pada hakekatnya diarahkan dan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan

Pemerintah Daerah (local government) kepada masyarakat agar lebih efisien dan responsif terhadap potensi, kebutuhan maupun karakteristik di masing-masing daerah. Dimana diharapkan dengan adanya otonomi daerah ini nantinya akan dapat membuat daerah yang dimekarkan tersebut untuk dapat berkembang dan berdiri sendiri yang tentunya juga akan menambah PAD (Pendapatan Asli Daerah) tersebut. ([dsfindonesia.org/userfiles/Studi Evaluasi Pemekaran Daerah/2007/01](http://dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah/2007/01)).

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah maka kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat perlu ditingkatkan. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Pada UUD 1945 terkandung makna Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Otonomi daerah merupakan wujud dari upaya pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya otonomi daerah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dengan semangat otonomi daerah itu pulalah muncul wacana-wacana melakukan pemekaran wilayah, yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, dan memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, percepatan kesejahteraan masyarakat, dsb. Pemekaran wilayah

harus benar-benar dilakukan untuk mendekatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat dan memperpendek alur pelayanan sehingga akan tercipta pelayanan berkualitas yang ditunjukkan dengan kemajuan suatu daerah otonom.

Berdasarkan pengalaman di masa lalu, daerah-daerah yang terbangun hanya daerah yang berdekatan dengan ibukota pemerintahan daerah. Pemekaran memungkinkan sumber daya mengalir ke daerah yang masih belum berkembang. Alasan lainnya yang juga dikemukakan adalah bahwa pemekaran akan mengembangkan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil. ([dsfindonesia.org/userfiles/Studi Evaluasi Pemekaran Daerah/2007/01](http://dsfindonesia.org/userfiles/Studi%20Evaluasi%20Pemekaran%20Daerah/2007/01)).

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah. Dengan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri berarti juga daerah tersebut berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar dapat lebih maju dari sebelumnya.

Sejak diberlakukannya UU No. 5 tahun 1974, pembangunan Indonesia dituntut untuk memperhatikan istilah desentralisasi, yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi sesuai dengan undang-undang. Namun masih ditemukan banyak kelemahan yang terjadi di dalam undang-undang ini yaitu tidak secara

tegas mengatur sampai seberapa jauh tingkat otonomi yang dimiliki daerah atau yang diberikan pusat ke daerah. Undang-undang ini hanya mencantumkan prinsip saja "pelaksanaan otonomi yang bersifat nyata dan bertanggung jawab." Sampai seberapa jauh nyata-nya dan batas-batas tanggung jawab seperti apa tidak ditegaskan.

Hal ini mengakibatkan pembangunan tetap berjalan secara sentralistis yang ditandai dengan peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pusat, dan pemerintah daerah praktis sekedar perpanjangan tangan dari pusat. Sejalan dengan pembangunan dalam mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata dengan kondisi yang ada pembangunan Indonesia mengalami kesenjangan kesejahteraan itu, ditengah arus globalisasi yang membuat batas-batas Negara semakin tipis, mobilitas faktor produksi semakin tinggi, arus informasi yang tidak terbandung, menurut sistem pemerintahan yang sentralistik harus diganti mengingat daerah di Indonesia memiliki keunikan sendiri, baik dari demografi maupun potensi ekonominya. Melihat inilah maka pemerintah menetapkan UU No. 22 tahun 1999 dalam memberi acuan dasar yang cukup tegas bagi pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk mengatur dan mengurus daerah sendiri.

Dalam acuan dasar tersebut setiap daerah harus membentuk suatu paket otonomi yang konsisten dengan kapasitas dan kebutuhannya.

“Dalam Negara majemuk seperti Indonesia, satu ukuran belum tentu cocok untuk semua daerah. Dalam proses ini komunitas-komunitas lokal perlu dilibatkan oleh pemerintah kabupaten/kota, termasuk DPR untuk menjamin

proses desentralisasi secara lebih baik dan bertanggung jawab dimana mereka sebagai salah satu stakeholder yang memiliki kepentingan mendalam untuk mensukseskan otonomi daerah (Widjaja, 2004)”.

Perjalanan desentralisasi inipun terus mengalami perkembangan diberbagai daerah dan dalam pelaksanaannya banyak ditemukan kelemahan terkhusus dari segi undang-undang yang mengaturnya sehingga dimunculkan beberapa undang-undang seperti dengan berlakunya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang hubungan keuangan pusat-daerah. Kedua undang-undang ini semakin memberikan kemudahan dalam melihat pencapaian pengelolaan daerah dimana pemerintah daerah. Hal ini yang berkaitan erat dengan kemandirian pelaksanaan pemerintah daerah adalah kebijakan fiscal daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

Tujuan pemekaran daerah adalah untuk melancarkan pembangunan yang tersebar diseluruh wilayah dan membina kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Dengan kata lain, bertujuan untuk menjamin perkembangan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan dengan azas dekonsentrasi. Lebih terperinci tujuan tersebut seperti dijelaskan dalam Undang-Undang No 32 tahun 2004 adalah :

- a. Mempercepat laju pertumbuhan pembangunan
- b. Upaya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c. Upaya untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Mempertinggi daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah.

- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.
- f. Terbinanya stabilitas politik dan kesatuan bangsa.

Namun seperti diketahui bahwa meskipun sudah ada otonomi daerah, pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari program regional, tetapi berasal dari program pembangunan sektoral yang dilaksanakan oleh Departemen teknis. Artinya program pembangunan daerah tersebut merupakan kombinasi dari asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Dengan cara demikian diharapkan disparitas kemajuan akibat pembangunan antar daerah dapat dikurangi. Keadaan seperti ini merupakan suatu ciri negara sedang berkembang, yaitu masih tingginya peranan pemerintah pusat dalam memperoleh dan menyalurkan dana kepada daerah (Majidi, 1991) Dalam kenyataan pelaksanaan pembangunan sektoral di daerah sering menimbulkan masalah. Hal ini disebabkan proyek pembangunan sektoral tersebut tidak sesuai dengan keinginan(aspirasi) daerah seiring perencanaan pembangunan sektoral lebih bersifat top-down.

“Pemekaran wilayah berakibat langsung terhadap terjadinya pembatasan wilayah dengan luasan yang lebih kecil, persebaran penduduk lebih konsentrasi, keuangan (PAD), dan perencanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Hal ini merupakan konsekuensi, karena walaupun diadakan pemekaran wilayah namun potensi wilayah yang bersifat alamiah dan sarana prasarana wilayah yang sudah terbangun tidak akan dapat dibagi. Demikian juga distribusi penduduk dan aktivitasnya yang sudah tersebar dengan keadaan saat ini juga sangat sulit diubah”.

Tolak ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar daerah dan antar sektor. pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan dan hasil pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati semua lapisan masyarakat. Menurut pandangan ekonomi klasik (Adam Smith) pada dasarnya ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu jumlah penduduk jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam serta tingkat teknologi yang digunakan. Proses pembentukan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah menyatakan bahwa pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis dan fisik kewilayahan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah aspek kesejahteraan masyarakat meliputi :PDRB Perkapita, Pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah. Persyaratan secara

teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan.

Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan. Dengan persyaratan dimaksud diharapkan agar daerah yang baru dibentuk dapat tumbuh, berkembang dan mampu menyelenggarakan otonomi daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang optimal guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan dalam memperkuat keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan dilakukannya pemekaran daerah adalah untuk membuka peluang-peluang baru bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dan meningkatkan intensitas pembangunan guna mensejahterakan masyarakat. Selain itu dengan adanya pemekaran daerah maka tuntutan akan mutu dari pelayanan yang diberikan pemerintah makin meningkat. Pemekaran daerah dalam arti pembentukan Kabupaten dan Kota, hendaknya juga ditujukan untuk memacu terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan membawa dampak pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, memperpendek jalur birokrasi, memperpendek rentang kendali, juga memberikan kemungkinan terbukanya isolasi-isolasi daerah yang terpencil. Pemekaran daerah merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan ketika

wilayah pelayanan telah menjadi terlalu luas, sehingga pemerintah tidak bisa optimal melaksanakan tugas-tugasnya termasuk dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat secara baik. Dalam pembentukan daerah, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah, dengan demikian baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud.

Tabel 1.1. PDRB Perkapita atas dasar Konstan berlaku kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018 (juta)

| Tahun | Lampung Utara | Way Kanan |
|--------------|----------------------|------------------|
| 2010 | 19,39 | 14,45 |
| 2011 | 20,62 | 16,04 |
| 2012 | 21,24 | 17,02 |
| 2013 | 22,76 | 19,15 |
| 2014 | 25,53 | 21,39 |
| 2015 | 27,78 | 23,24 |
| 2016 | 30,76 | 25,27 |
| 2017 | 33,69 | 27,51 |
| 2018 | 36,73 | 29,57 |

Sumber BPS, 2019

Tabel 1.1 menunjukkan PDRB Perkapita atas dasar harga konstan kabupaten lampung utara dan kabupaten way kanan tahun 2010-2018, berdasarkan data pada tabel 1.1 PDRB ADHB Kabupaten Lampung Utara lebih besar daripada PDRBADHB Kabupaten Way Kanan.

Tabel 1.2. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018 (persen)

| Tahun | Lampung Utara | Way Kanan |
|-------|---------------|-----------|
| 2010 | 6,47 | 5,32 |
| 2011 | 6,89 | 5,18 |
| 2012 | 6,77 | 5,21 |
| 2013 | 6,46 | 5,28 |
| 2014 | 5,8 | 5,67 |
| 2015 | 5,43 | 5,27 |
| 2016 | 5,1 | 5,12 |
| 2017 | 5,21 | 5,11 |
| 2018 | 5,62 | 5,43 |

Sumber BPS, 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan, Berdasarkan data tabel 1.2 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung utara sebagai kabupaten induk lebih baik dari pada Kabupaten Way Kanan.

Tabel 1.3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan Tahun 2010-2018

| Tahun | Lampung Utara | Way Kanan |
|-------|---------------|-----------|
| 2010 | 67,28 | 71,03 |
| 2011 | 64,63 | 67,97 |
| 2012 | 67,65 | 66,97 |
| 2013 | 65,78 | 68,54 |
| 2014 | 63,76 | 67,51 |
| 2015 | 62,26 | 69,5 |
| 2016 | 70,42 | 71,27 |
| 2017 | 65,29 | 68,45 |
| 2018 | 67,65 | 69,5 |

Sumber BPS 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.3 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan TPAK Kabupaten Lampung Utara lebih besar dari pada Kabupaten Way Kanan.

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanantahun 2010-2018 (Ribu Jiwa)

| Tahun | Lampung Utara | Way Kanan |
|--------------|----------------------|------------------|
| 2010 | 164,8 | 76,7 |
| 2011 | 155,81 | 72,51 |
| 2012 | 149,95 | 69,37 |
| 2013 | 142,01 | 65,18 |
| 2014 | 140,73 | 64,5 |
| 2015 | 140,4 | 63,1 |
| 2016 | 139,5 | 63,64 |
| 2017 | 131,78 | 62 |
| 2018 | 128,02 | 60,16 |

Sumber BPS 2019

Tabel 1.4 menunjukkan jumlah penduduk miskin Kabupaten Lampung Utara lebih besar dari pada jumlah penduduk miskin Kabupaten Way Kanan.

Tabel 1.5. Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan tahun 2010-2018

| Tahun | Lampung Utara | Way Kanan |
|--------------|----------------------|------------------|
| 2010 | 61,82 | 61,27 |
| 2011 | 62,67 | 62,04 |
| 2012 | 62,93 | 62,79 |
| 2013 | 64 | 63,92 |
| 2014 | 64,89 | 64,32 |
| 2015 | 65,2 | 65,18 |
| 2016 | 65,95 | 65,74 |
| 2017 | 66,58 | 65,97 |
| 2018 | 67,17 | 66,63 |

Sumber BPS 2019

Berdasarkan data pada tabel 1.5 menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia(IPM) Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mencoba menganalisis sejauh mana pelaksanaan pemekaran wilayah terhadap Sosial ekonomi masyarakat tersebut. Untuk itu penulis mengambil judul :

“Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat lampung utara pasca pemekaran wilayah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana dampak Pemekaran Daerah Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kabupaten Lampung Utara ?

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas, maka penulis perlu untuk membuat pembatasan masalah yang akan diteliti. Adapun pembatasan masalah sosial ekonomi yang akan dikemukakan indikatornya hanya terbatas ekonomi (PDRB Perkapita, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, Jumlah penduduk Miskin) social pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

D. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui kondisi Perekonomian, Pendidikan, Kesehatan (Sosial Ekonomi) masyarakat di Kabupaten Lampung Utara Pasca Pemekaran Wilayah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam rangka pengembangan konsep konsep, teori teori, terutama terhadap pemecahan masalah pemekaran daerah terhadap sosial ekonomi masyarakat Kabupaten lampung Utara, Sebagai bahan masukan atau kajian untuk melakukan penelitian selanjutnya atau sebagai selanjutnya, Untuk memperkaya wawasan ilmiah dan non ilmiah penulis dalam disiplin ilmu yang penulis tekuni serta

mengaplikasikannya secara konseptual dan tekstual dan masukan bagi penelitian lain.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini akan terbagi dalam lima bab yang tersusun sebagai berikut :

- I. **Pendahuluan.**
Menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.
- II. **Tinjauan Pustaka**
Menguraikan secara ringkas landasan teori yang menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. Selain itu, bab ini berisi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk dikaji dan dibandingkan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pikir, serta beberapa hipotesis yang akan diuji dalam penelitian tersebut.
- III. **Metode Penelitian**
Memuat tentang metode pencarian dan analisis data yang digunakan dalam penelitian, berserta sumber data dan batasan variabel.
- IV. **Pembahasan dan Hasil Penelitian**
Menyajikan hasil estimasi data melalui alat analisis yang telah di sediakan.
- V. **Penutup**
Memuat kesimpulan dan saran setelah melakukan penelitian.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Pustaka

1. Pembangunan

Pembangunan mempunyai pengertian yang sangat luas, secara sederhana pembangunan itu adalah perubahan kearah yang lebih baik dan lebih maju dari sebelumnya. Pembangunan dapat diartikan juga sebagai gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan. Dimana gagasan tersebut lahir dalam bentuk usaha untuk mengarahkan dan melaksanakan pembinaan, pengembangan, serta pembangunan bangsa. Sepeti yang telah diuraikan diatas, pembangunan merupakan perubahan menuju kearah perbaikan. Perubahan ke arah perbaikan itu sendiri memerlukan pengerahan segala budi daya manusia untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Dengan sendirinya pembangunan merupakan proses penalaran dalam rangka menciptakan kebudayaan dan peradaban manusia.

Pembangunan tidak dapat berhenti atau dihentikan karena manusia hidup selalu dipenuhi oleh suasana perubahan. Inti pembangunan bukan hanya terjadinya perubahan struktur fisik atau material, tetapi juga menyangkut perubahan sikap masyarakat. Pembangunan harus mampu membawa umat manusia melampaui pengutamakan aspek-aspek materi dari kehidupannya

sehari-hari. Di samping itu pembangunan adalah upaya memajukan atau memperbaiki serta meningkatkan nilai sesuatu yang sudah ada.

Dalam rangka pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengadaan sarana kebutuhan masyarakat. Pada dasarnya, pemekaran wilayah merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. (*dsfindonesia/2007/15*)

2. Pemerintahan Daerah

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah oleh DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, pemerintahan daerah meliputi :

- a. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah

Pemerintah daerah sebagai badan eksekutif daerah dalam PP No.8/2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah meliputi kepala daerah beserta perangkat daerah. Kepala daerah dalam hal ini untuk kecamatan adalah

Camat, untuk kabupaten adalah Bupati dimana kepala daerah ini dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakilnya dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Berhasil tidaknya seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Demikian pula halnya dengan kepala daerah, berhasil tidaknya ia menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya serta loyalitasnya kepada masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah, perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintahan daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari sekretariat daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan satuan polisi pamong praja sesuai dengan kebutuhan daerah (Nurcholis, 2007 : 225) Penyelenggaraan otonomi daerah ini didasarkan pada isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD 1945 dengan pokok pikiran sebagai berikut :

- a. Sistem ketatanegaraan wajib menjalankan prinsip pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan desentralisasi dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan daerah kota. Daerah desentralisasi berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

- c. Pembagian daerah diluar provinsi dibagi ke dalam daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada dalam daerah kabupaten dan daerah kota dapat dijadikan daerah otonom baru.
- d. Kecamatan yang menurut Undang-Undang No.5 Tahun 1974 sebagai wilayah administrasi dalam rangka dekonsentrasi kedudukannya diubah menjadi perangkat daerah kabupaten atau daerah kota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah akan sangat kompleks dan problematis. Di lapangan ada banyak masalah yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan pada saat penyusunan konsep. Dengan demikian diperlukan semacam prinsip sebagai acuan dalam mengatasi masalah-masalah di lapangan. Adapun prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu :

- a. Dipergunakannya asas desentralisasi, dekonsentrasi dan juga tugas pembantuan;
- b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang dilaksanakan di daerah kabupaten dan daerah kota; dan
- c. Tugas pembantuan dapat dilaksanakan di daerah propinsi, daerah kabupaten, daerah kota dan juga desa. (Iswandi, 2002 : 9-10)
- d. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkokoh Negara kesatuan dan juga mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat.
- e. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan UU No.5/1974.

Tujuan pemberian otonomi kepada daerah antara lain yaitu : (1) Untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan untuk mengatur dan mengurus

rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. (2) dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan, undang-undang ini menitikberatkan otonomi daerah pada daerah tingkat II dengan pertimbangan bahwa daerah tingkat II langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan dapat lebih mengerti dan memenuhi aspirasi masyarakat. (3) pemyerahan urusan-urusan pemerintahan kepada daerah dilakukan secara bertahap disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah yang bersangkutan. (4) Meskipun berbagai urusan telah diserahkan kepada daerah sebagai pelaksana asas desentralisasi tetapi tanggungjawab terakhir terhadap urusan-urusan tersebut tetap berada di tangan pemerintah. (Widarta, I. 2005)

3. Pemekaran Daerah

Secara umum, pemekaran daerah dapat diartikan sebagai pemisahan diri suatu daerah dari induknya dengan tujuan mendapatkan status yang lebih tinggi dan meningkatkan pembangunan daerah Pemekaran yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 5 ayat 2 dinyatakan daerah dapat dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah, namun setelah UU No.22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, maka materi pemekaran wilayah tercantum pada pasal 4 ayat (3) dan (4), namun istilah yang dipakai adalah Pemekaran Daerah berarti pengembangan dari satu daerah otonom menjadi dua atau lebih daerah otonom. Dalam UU No 32

Tahun 2004 tersebut pada pasal 4 ayat 3 dinyatakan : Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Sedangkan dalam Pasal 4 ayat 4 dalam UU tersebut dinyatakan : Pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pemekaran daerah adalah pemecahan provinsi atau kabupaten/kota menjadi dua ataupun lebih. Rasyid (1997 : 20) mengatakan bahwa pembentukan daerah pemekaran merupakan perluasan daerah dengan memekarkan/meningkatkan status daerah yang dianggap mempunyai potensi sebagai daerah otonom dan mampu untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Menurut Kastorius (Wahyudi, 2002), ide pemekaran daerah setidaknya harus menjawab tiga isu pokok, yaitu :

a. Urgensi dan Relevansi

Dalam hal ini apakah urgensi pemekaran daerah berkaitan dengan penuntasan masalah kemiskinan dan marginalitas etnik. Jika tidak maka pemekaran daerah akan berdampak negative. Pertimbangan lain dari pemekaran daerah biasanya didasari oleh adanya potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia yang terbatas. Jalan keluar yang paling mungkin adalah mengundang pihak luar menjadi investor dan ketika keputusan ini diambil maka tidak lama setelah itu akan terjadi

proses eksploitasi yang sangat besar terhadap kekayaan alam yang dimiliki oleh daerah tersebut. Cara berfikir seperti inilah yang sangat mengkhawatirkan dan berpotensi mengundang terjadinya proses kemiskinan.

b. Prosedur

Dalam hal ini apakah prosedur pemekaran daerah sudah ditempuh dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan. Jika tidak maka proses pemekaran daerah ini akan berbelit-belit karena rantai birokrasi yang mengurus persoalan seperti ini memerlukan proses yang sangat panjang.

c. Implikasi

Dalam hal ini yaitu sejauh mana pemekaran daerah memberi dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan berimplikasi terhadap terpeliharanya identitas etnis dan agama. Selain itu hal yang juga harus dipikirkan adalah terjadinya konflik berkaitan dengan ide pemekaran daerah tersebut karena selain pihak yang memberi dukungan, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang tidak menyetujui ide pemekaran daerah tersebut.

4. Tujuan Pemekaran Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, tujuan pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan pemekaran wilayah diharapkan dapat memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, mampu meningkatkan berbagai potensi yang

selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, membuka keterkungkungan masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ Ibukota kabupaten atau Ibukota kecamatan, memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, dan sebagainya. Selain hal tersebut diatas, terdapat beberapa tujuan dari pemekaran daerah lainnya yaitu :

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
- b. Memperkokoh Basis Ekonomi Rakyat
- c. Mengatur Perimbangan Keuangan Daerah dan Pusat
- d. Membuka Peluang dan Lapangan Pekerjaan
- e. Memberikan Peluang Daerah Mendapatkan Investor Secara Langsung

Menurut Latuconsina, pemekaran daerah adalah bagian dari proses implementasi desentralisasi yang memiliki berbagai macam tujuan yang dapat diklasifikasikan ke dalam dua variabel yakni peningkatan dan efektifitas penyelenggaraan pemerintah serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah sehingga melalui otonomi daerah akan terjadi optimalisasi pelayanan publik dilakukan oleh instansi yang memiliki kedudukan yang lebih dekat dengan masyarakat sehingga keputusan-keputusan strategis dapat dibuat lebih mudah, adanya penyesuaian layanan terhadap kebutuhan dan kondisi yang ada di tingkat lokal, adanya tingkat perawatan terhadap infrastruktur yang ada melalui alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di wilayah masing-

masing, adanya pengalihan fungsi-fungsi kebijakan, adanya peningkatan kompetisi dalam penyediaan layanan di antara unit-unit pemerintah dan antar sektor publik dan swasta berdasarkan arahan dari pemerintah daerah dapat menjadikan birokrasi yang lebih berorientasi pada daerah.

5. Dampak Pemekaran Daerah

Studi dampak pemekaran daerah secara komprehensif belum pernah dilakukan. Namun demikian beberapa studi telah mulai melihat secara parsial apa yang terjadi di beberapa daerah otonom baru. Bappenas (2005) telah menghasilkan Kajian Percepatan Pembangunan Daerah Otonom Baru (DOB). Studi tersebut menyimpulkan bahwa pada aspek keuangan daerah, telah terjadi peningkatan pendapatan asli daerah meskipun pada umumnya ketergantungan terhadap Dana Alokasi Umum masih tinggi. Di samping itu, juga terjadi peningkatan pada proporsi belanja pembangunan meskipun proporsi terhadap belanja rutin masih kecil. Namun demikian penilaian responden masyarakat menunjukkan belum adanya perubahan antara sebelum dan sesudah pemekaran. Hal ini dikarenakan karena pemda DOB tengah melakukan pembenahan kelembagaan, infrastruktur kelembagaan, personil dan keuangan daerahnya. Sedangkan pada aspek pengelolaan sumberdaya aparatur menunjukkan bahwa rasio jumlah aparatur terhadap total penduduk DOB masih dibawah rata-rata nasional meskipun untuk beberapa daerah sampel tidak terjadi hubungan yang signifikan antara jumlah aparatur dan kepuasan pelayanan publik.

Persoalan mendasarnya ialah karena DOB kurang mampu merumuskan dengan tepat kewenangan ataupun urusan yang akan dilaksanakan sesuai

dengan kondisi dan karakteristik daerah serta kebutuhan masyarakat. (*dsfindonesia/2007/02-03*). Implikasi adanya otonomi daerah dan daerah otonom yang berdasarkan asas desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi daerah. Salah satu dampak positif dari pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pemekaran daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang hampir terjadi diseluruh Indonesia. Dengan disahkannya UU tentang otonomi daerah maka terdapat dampak positif dan juga dampak negatif dari pemekaran tersebut, yakni :

a. Dampak Positif

1. Daerah tidak lagi harus menunggu petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, ataupun instruksi pusat sebagaimana yang terjadi pada masa orde baru
2. Dimungkinkannya pemberdayaan DPRD dalam relasi kekuasaan dengan kepala daerah.
3. Kembalinya sebagian besar putra daerah ke kampung halaman masing-masing daerah pemekaran untuk ikut membangun daerah tersebut tentunya merupakan suatu hal yang sangat positif.

b. Dampak Negatif

1. Pemekaran daerah hanya untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok yang menginginkan jabatan tertentu seperti : gubernur, walikota, bupati, camat, dll.
2. Munculnya primordialisme putra daerah.
3. Pemekaran daerah dapat berpotensi mematikan daerah induk.

6. Sosial Ekonomi

a. Pengertian Sosial Ekonomi

Kata sosial berasal dari kata *socious* yang berarti kawan atau teman. Dalam hal ini kawan adalah mereka atau orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal kita dalam satu lingkungan tertentu dan mempunyai sifat yang saling mempengaruhi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat (Salim, 2002), sedangkan dalam konsep sosiologi manusia sering disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya bahwa manusia tidak dapat hidup dengan wajar tanpa keterlibatan orang lain disekitarnya.

Dalam menghadapi sekelilingnya, manusia harus hidup berkawan dengan manusia lainnya dan juga bergaul untuk mendapatkan kepuasan baginya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomi berarti segala sesuatu tentang azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti perdagangan, hal keuangan dan perindustrian (Salim, 2002 : 379). Seiring dengan perkembangan dan perubahan masyarakat, maka pengertian ekonomi juga sudah lebih luas. Ekonomi juga diartikan sebagai cara manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ekonomi bertalian dengan proses pemenuhan keperluan hidup manusia sehari-hari. sosial ekonomi itu sendiri merupakan gabungan dari pendidikan, pendapatan dan pekerjaan.

b. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi adalah suatu keadaan pada suatu waktu tertentu, Kata sosial berarti segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat, sedangkan kata

ekonomi berarti segala sesuatu tentang azas-azas produksi, distribusi dan pemakaian barang-barang serta kekayaan. Jadi kondisi sosial ekonomi adalah suatu keadaan atau kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam struktur sosial masyarakat. Untuk melihat kondisi sosial ekonomi seseorang maka perlu diperhatikan beberapa faktor, antara lain yaitu : Produk domestik regional bruto (PDRB) Perkapita, Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), Jumlah Penduduk miskin.

Kehidupan sosial merupakan suatu strategi yang dilakukan oleh sekelompok orang guna pemenuhan kebutuhan hidup serta menggunakan penghasilannya untuk mengarahkan produksi barang yang diperlukan. Oleh karena itu, maka perlu dikembangkan suatu strategi yang diarahkan pada tujuan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Adapun model pemenuhan kebutuhan dasar sebagai suatu strategi harus mampu memiliki 5 (lima) sasaran utama, yaitu :

Terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan, peralatan sederhana dan berbagai kebutuhan yang secara luas dipandang perlu oleh masyarakat.

1. Dibukanya kesempatan yang luas untuk memperoleh berbagai pelayanan umum, seperti : pendidikan, kesehatan, air minum dan pemukiman yang sehat.
2. Dijaminnya hak untuk memperoleh kesempatan untuk bekerja yang produktif termasuk kemungkinan menciptakan usaha sendiri.

3. Terbinanya prasarana yang memungkinkan produksi barang dan jasa dengan kemampuan untuk menyisihkan tabungan bagi pembiayaan usaha selanjutnya.
4. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan atas pelaksanaan pembangunan dan juga sosialisasi dalam lingkungan masyarakat.

B. Penelitian sebelumnya

Menurut Afriani, dkk (2012), studi kasus di Kabupaten Tana Toraja bahwa dampak pemekaran daerah sudah baik di Kabupaten ini daerah induk sudah layak untuk dimekarkan baik dari segi kinerja perekonomian daerah, kinerja keuangan pemerintah daerah, kinerja pelayanan publik dan kinerja aparatur pemerintah daerah. Senada dengan yang diungkapkan oleh Yulianti (2011) dalam evaluasi hasil pemekaran studi kasus pemekaran Kabupaten bahwa analisa dan evaluasi terhadap kebijakan pemekaran Kabupaten yang dimekarkan tahun 1999 dengan fokus pada perekonomian daerah dan pelayanan publik dengan menggunakan treatment control yaitu membandingkan DOB dengan daerah yang tidak melakukan pemekaran selain dibandingkan juga pada daerah induknya. Hasilnya dari indikator-indikator yang diteliti bahwa pemekaran Kabupaten memberikan dampak negatif dimana daerah yang dimekarkan tidak lebih baik dari daerah induk walaupun sedikit lebih baik dari daerah kontrol.

Menurut Riani dan Pudjihardjo (2012) mengenai dampak pemekaran wilayah terhadap pendapatan perkapita, kemiskinan dan ketimpangan antar wilayah di propinsi papua, dampak pemekaran wilayah yang diuji pada dasarnya merupakan dampak terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di propinsi papua yang meliputi dampaknya terhadap kenaikan pendapatan perkapita, penurunan

ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hasil pengujian dengan alat statistik sederhana yakni t-test equal mean menunjukkan : kebijakan pemekaran daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap perubahan pendapatan perkapita, adanya indikasi yang kuat dan signifikan bahwa pemekaran daerah mempunyai pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di daerah kota. Secara keseluruhan pemekaran daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di propinsi papua. Kebijakan pemekaran daerah di propinsi papua hanya mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Propinsi Papua.

Berbeda dengan yang di ungkapkan oleh Furry dan Sasana (2013) mengenai dampak pemekaran daerah terhadap kinerja ekonomi dan kinerja pelayanan publik di kota Serang. Berdasarkan penelitian ini berdasarkan perbandingan nilai indeks bahwa kinerja ekonomi Kota Serang lebih baik dibandingkan kinerja ekonomi Kabupaten induknya. Berdasarkan perbandingan nilai indeks bahwa kinerja pelayanan publik Kota Serang lebih baik daripada Kabupaten induknya. Hasil survey yang dilakukan UNDP dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) juga menunjukkan daerah induk tetap lebih baik daripada daerah pemekaran baru.

Hermantyo (2007) dalam penulisannya yang berjudul pemekaran daerah dan konflik keuangan menyatakan, semakin banyak daerah pemekaran, semakin banyak potensi konflik keruangan karena jumlah garis batas antar wilayah sebagai sumber konflik jumlah semakin banyak, dimana hampir mendekati 500 kabupaten/kota serta, karakteristik wilayah Indonesia memiliki jenis garis batas

yaitu batas darat dan batas laut dan garis batas darat lebih potensial untuk terjadinya konflik keruangan.

Selanjutnya Sayori (2008) menyatakan pemekaran wilayah belum secara nyata meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, namun dari tahun ke tahun terdapat kecendrungan adanya peningkatan ekonomi wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan kapasitas fiskal setelah adanya pemekaran tumbuh secara nyata tetapi perkembangan cenderung menurun, hal ini disebabkan adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dari dana perimbangan dan belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hasil analisis koresponden menyatakan secara umum masyarakat menilai pembangunan meningkat setelah pemekaran.

Menurut Syafrizal (2000), secara umum, permasalahan yang sering timbul sebagai akibat dilakukannya pemekaran wilayah antara lain adalah :

1. Kurang lancarnya pelaksanaan administrasi pemerintahan karena relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia yang terdapat pada daerah pemekaran bersangkutan;
2. Kesulitan keuangan daerah karena rendahnya rasio kapasitas dan kebutuhan fiskal yang kemudian mengakibatkan pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan belum dapat dilakukan secara optimal;
3. Kegiatan ekonomi pada daerah asal mundur karena sebagian besar potensi ekonomi daerah termasuk ke dalam daerah pemekaran;
4. Terjadi konflik sosial karena sebagian masyarakat tidak setuju dengan pemekaran yang telah dilakukan.

Oleh karena itu diperlukan kajian daerah sebelum mengusulkan pemekaran daerah suatu wilayah. Kajian daerah ini merupakan hasil kajian yang dibentuk oleh kepala daerah yang bersangkutan untuk menilai kelayakan pembentukan daerah otonom baru secara obyektif yang memuat penilaian kuantitatif terhadap faktor-faktor teknis. Penilaian kuantitatif ini dilengkapi dengan proyeksi faktor-faktor dominan (kependudukan, potensi daerah, kemampuan ekonomi dan kemampuan keuangan) selama 10 (sepuluh) tahun dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Induk serta penilaian kualitatif terhadap faktor lainnya yang memiliki karakteristik tersendiri antara lain potensi sumber daya alam yang belum tergali, kondisi etnik, potensi konflik dan historis. Kabupaten Lampung Utara memiliki potensi ekonomi yang beragam

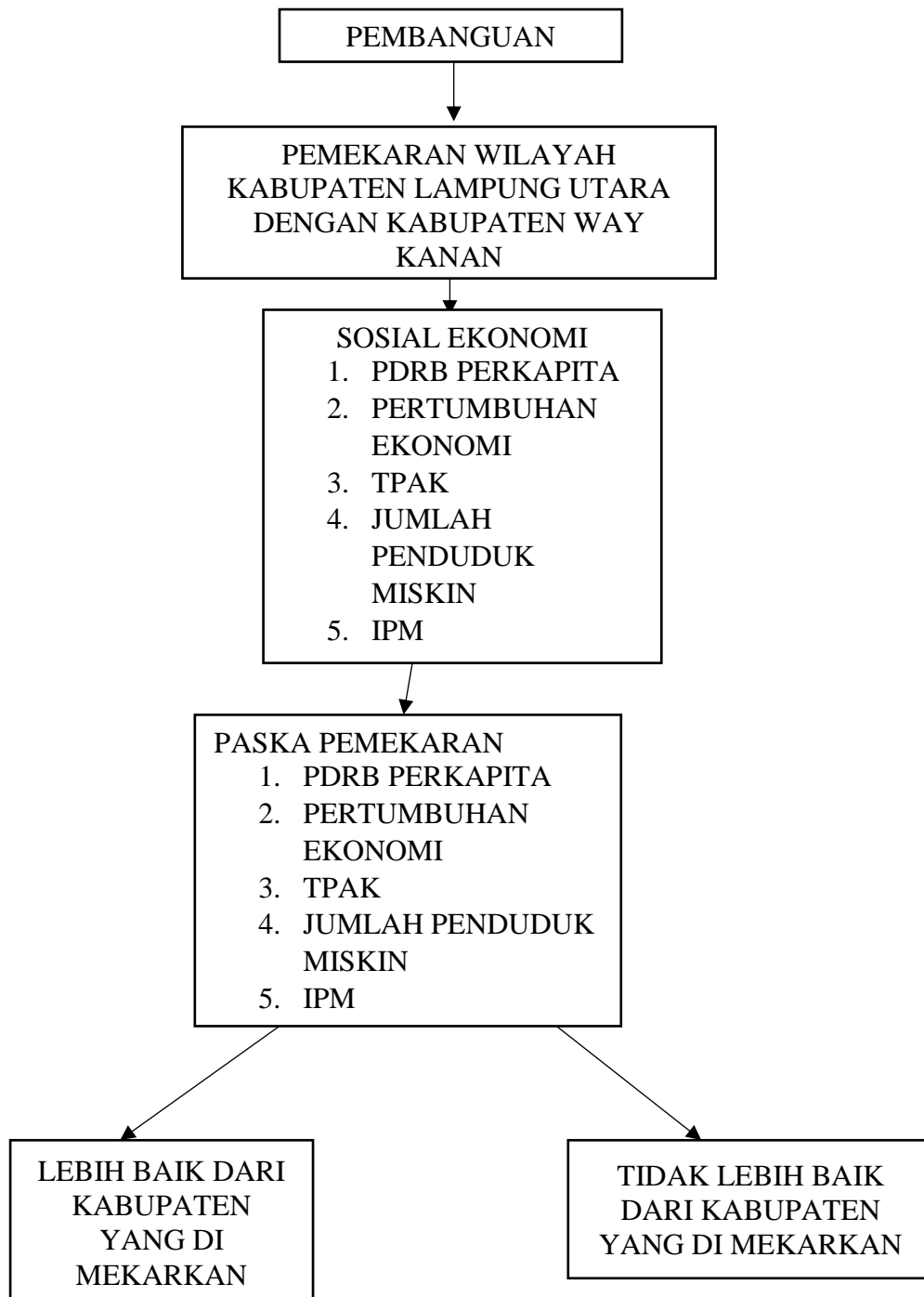
C. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari pemekaran wilayah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 adalah; a). peningkatan kesejahteraan masyarakat; b). percepatan pertumbuhan demokrasi masyarakat; c). percepatan perekonomian daerah; d). percepatan pembangunan daerah e). peningkatan keamanan dan ketertiban; dan f) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Kondisi yang lebih baik setelah pemekaran merupakan indikator keberhasilan dari suatu pemekaran wilayah. Bukan saja pada daerah yang dimekarkan tetapi juga di daerah induk. Kabupaten Lampung Utara dalam melakukan pemekaran dengan Kabupaten Way Kanan telah layak dilakukan, hal ini disebabkan oleh ; 1) Jarak dan rentang kendali pemerintahan yang jauh menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak efektif dan efisien; 2). Infrastruktur sangat terbatas; 4). tingkat kemiskinan

cukup tinggi disertai minimnya sumberdaya manusia (SDM). Dengan adanya pemekaran wilayah di Kabupaten Lampung Utara maka secara tidak langsung dapat meringankan beban tugas Kabupaten ini sebagai Kabupaten induk, pemerintah dapat lebih konsentrasi dalam melayani masyarakat juga pembangunan akan lebih terasa dan merata dengan wilayah yang relatif kecil dan masyarakat yang relatif sedikit.

Berikut ini adalah bagan kerangka pemikiran :

Gambar 2.1 Bagan Alir Pemikiran



D. Defenisi Konsep

Konsep merupakan sejumlah pengertian atau ciri ciri yang berkaitan dengan berbagai peristiwa, objek, kondisi, situasi dan hal lain yang sejenis. Konsep diciptakan dengan mengelompokkan objek objek atau peristiwa peristiwa yang mempunyai ciri ciri yang sama. Defenisi konsep bertujuan untuk merumuskan sejumlah pengertian yang digunakan secara mendasar dan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti serta menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian (Silalahi, 2009).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat kabupaten lampung utara pasca pemekaran daerah Kabupaten Lampung Utara, oleh karena itu dirumuskan defenisi konsep yang bertujuan menyamakan persepsi tentang apa yang akan diteliti untuk menghindari salah pengertian yang dapat mengaburkan tujuan penelitian.

Yang menjadi defenisi konsep dalam penelitian ini :

1. Pemekaran daerah adalah pemecahan atau pemisahan diri suatu daerah dengan daerah induknya sebagai daerah otonom baru untuk dapat berdiri sendiri dan menjadi daerah yang mandiri dimana syarat dan ketentuan pembentukan daerah diatur dalam peraturan pemerintah.
2. Sosial ekonomi merupakan kombinasi dari pendapatan pendidikan, kesehatan. Pendapatan adalah penerimaan atas sejumlah uang yang di dapat dari hasil usaha yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran seseorang dalam mengembangkan potensi dirinya

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Kesehatan adalah keadaan dimana stamina tubuh fit dan terjaga sehingga dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan baik. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang hidup bersama yang berinteraksi menurut sistem adat istiadat, hukum, agama dan sosial budaya yang bersifat kontiniu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Pembangunan adalah usaha perubahan menuju kearah yang lebih baik yang merupakan suatu gagasan untuk mewujudkan sesuatu yang dicita-citakan.

E. Defenisi Operasional

Defenisi operasional merupakan seperangkat petunjuk atau kriteria atau operasi yang lengkap tentang apa yang harus diamati dan bagaimana mengamatinya dengan memiliki rujukan- rujukan empiris. Bertujuan untuk memudahkan penelitian dalam melaksanakan penelitian lapangan. Maka perlu operasionalisasi dari konsep konsep yang menggambarkan tentang apa yang harus diamati (Silalahi, 2009 : 120).

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan subjek atau objek penelitian deskriptif dalam pelaksanaannya lebih terstruktur, sistematis dan terkontrol, peneliti memulai dengan subjek yang jelas dan mengadakan penelitian atas populasi atau sampel dari subjek tersebut untuk menggambarkan secara akurat (Silalahi, 2009). Metode penelitian deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan sosial ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Utara setelah terjadinya pemekaran daerah Kabupaten Lampung Utara dengan Kabupaten Way Kanan di tahun 1999.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Utara. Sebagai Kabupaten yang di mekarkan dengan Kabupaten Way Kanan Adapun alasan pemilihan lokasi di daerah ini karena peneliti melihat Kabupaten Lampung Utara adalah salah satu kabupaten tertua yang ada di Provinsi Lampung, namun tertinggal dengan beberapa kabupaten yang baru, dan tidak terlihat kemajuan yang terjadi. Selain itu juga karena masih sangat jarang dilakukan penelitian di daerah ini sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai daerah ini terutama setelah adanya pemekaran Kabupaten Lampung Utara.

C. Jenis Data

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari instansi dan dinas-dinas yang terkait dengan penelitian. BPS, Bappeda, Dinas Pendapatan Daerah dan hasil penelitian terdahulu. Data setelah pemekaran digunakan data mulai tahun 2010 – 2018. Pemilihan penggunaan data pada tahun 2010-2018 dikarenakan menurut Bappenas Bahwa Kabupaten baru di anggap mandiri setelah 4 tahun pemekaran, 4 tahun setelah pemekaran adalah tahun 2005, namun untuk meyakinkan bahwasanya daerah tersebut sudah benar-benar mandiri, maka penulis menambahkan satu periode RPJMD, menjadi tahun 2010. Data sekunder yang dikumpulkan adalah; data PDRB perkapita, Pertumbuhan ekonomi, Tingkat Partisipasi angkatan kerja (TPAK), Jumlah Penduduk Miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

D. Definisi Operasional

1. PDRB Perkapita tahun dasar 2010

PDRB adalah jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB perkapita adalah suatu pendapatan rata-rata dari masyarakat dalam suatu daerah. Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan distribusi pendapatan (Muta'ali 2015).

Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi wilayah, dapat dilihat melalui tingginya pendapatan masyarakat. Bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai indikator penentu kemajuan wilayah. Analisis ini, termasuk indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah, sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil dari pembangunan.

Pendapatan perkapita kerap kali menjadi indikator dalam menilai kesejahteraan penduduk pada suatu wilayah, karena indikator ini dinilai lebih baik bila hanya menggunakan indikator laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi tentu dapat mengindikasikan majunya suatu wilayah dari segi ekonomi, dalam penelitian ini data PDRB Perkapita yang penulis gunakan adalah PDRB Perkapita dengan tahun dasar 2010.

Menurut permendagri no 86 tahun 2017 rumus PDRB perkapita adalah :

$$\text{PDRB Perkapita : } \frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan Tahun}}$$

2. Pertumbuhan ekonomi

Pengertian Pertumbuhan Ekonomi adalah sebuah kondisi dimana meningkatnya pendapatan karena terjadi peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan pendapatan tersebut tidak dikaitkan dengan tingkat pertumbuhan jumlah penduduk, dan dapat kita lihat dari output yang meningkat, perkembangan teknologi, dan berbagai inovasi di bidang sosial.

Pertumbuhan Ekonomi juga dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan perekonomian negara dalam jangka waktu tertentu untuk menuju kondisi ekonomi yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi identik dengan kenaikan kapasitas produksi yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan. suatu

wilayah yang mengalami pertumbuhan ekonomi diindikasikan dengan kehidupan masyarakatnya yang lebih baik

Rumus Pertumbuhan ekonomi menurut Permendagrino 86 tahun 2017 adalah :

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi : } \frac{(\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1})}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

PDRB_t : PDRB tahun t
PDRB_{t-1} : PDRB tahun sebelumnya

3. Tingkat Partisipasi Angkatan kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. TPAK mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja. TPAK dapat digunakan sebagai indikator tingkat kesulitan angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Angka TPAK yang rendah menunjukkan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja . Sebaliknya, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia, Perhitungan TPAK menurut Permendagri no 86 tahun 2017 adalah :

$$\text{TPAK : } \frac{(\text{Jumlah penduduk angkatan Kerja})}{\text{Jumlah Penduduk Usia Angkatan Kerja (15-64 Tahun)}} \times 100\%$$

4. Jumlah Penduduk Miskin

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidup manusia serba kekurangan atau “tidak memiliki harta beda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian

kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak. Kemiskinan sangat berhubungan dengan masalah kesejahteraan masyarakat dan menjadi tingkat minimum yang didapatkan berdasarkan standar hidup masyarakat di suatu negara.

Penduduk miskin adalah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, Rumus Penghitungan Garis Kemiskinan menurut Badan Pusat statistik (BPS) adalah :

$$\mathbf{GK = GKM + GKNM}$$

Dimana :

GK = Garis Kemiskinan

GKM = Garis Kemiskinan.Makan

GKNM = Garis Kemiskinan non Makan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Badan Pusat Statistik).

IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR).

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar :

1. Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life)
2. Pengetahuan (knowledge)
3. Standar hidup layak (decent standard of living)

Perhitungan IPM menurut BPS adalah :

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} [\text{X}_{(1)} + \text{X}_{(2)} + \text{X}_{(3)}]$$

dimana :

$\text{X}_{(1)}$: Indeks harapan hidup

$\text{X}_{(2)}$: Indeks pendidikan = $\frac{2}{3}$ (indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (indeks rata-rata lama sekolah)

$\text{X}_{(3)}$: Indeks standar hidup layak

Menurut BPS Manfaat IPM adalah :

1. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
2. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

3. Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

E. Teknik Analisis Data

1. Alat Analisis

Untuk menjawab permasalahan yang di angkat maka penulis menggunakan metode deskriptif dalam penelitian ini. Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut Nazir (1988) dalam Buku Contoh Metode Penelitian, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

Menurut Sugiyono (2005:) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960: 160) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif

merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual.

2. Statistik Deskripsi

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan (Sugiono, 2011). Data deskriptif dapat disajikan kedalam tabel, grafik, diagram, dan lain-lain yang mudah dibaca dan dipahami.

3. Uji Independen t-test

Independent Sample t test adalah uji komparatif atau uji beda untuk mengetahui adakah perbedaan mean atau rerata yang bermakna antara dua kelompok bebas yang berskala data interval atau rasio. Dua kelompok bebas yang dimaksud disini adalah dua kelompok yang tidak berpasangan, artinya sumber data berasal dari dua subjek yang berbeda. Sebelum dilakukan uji t test (Independent Sample t test) dilakukan uji kesamaan varian dengan F test (Levene's Test), artinya jika varian sama, maka penggunaan Equal Variances Assumed (diasumsikan varian sama) dan jika varian berbeda menggunakan Equal Variances Not Assumed (diasumsikan varian berbeda) (Priyanto, 2008). Pemrosesan data menggunakan SPSS (Statistical Package for the Social Science).

dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- a) Dengan Nilai Sig.(2 Tailed) < 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antara Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waykanan

b) Dengan Nilai Sig.(2 Tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Waykanan

Menurut Jogiyanto (2007) Independent Samples T Test dapat pula ditulis dengan rumus :

$$t_{\text{hitung}} = \frac{X_1 - X_2}{\sqrt{\frac{(n_1-1)s_{12} + (n_2-1)s_{12}}{n_1+n_2-2} \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$$

X_i : adalah rata-rata skor / nilai kelompok i.

N_i : adalah jumlah responden kelompok i

s_{i2} : adalah variance skor kelompok i.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kabupaten Lampung Utara sebagai kabupaten induk dari Kabupaten Way Kanan pada Produk domestik regional bruto (PDRB) perkapita, pertumbuhan ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), dan Indeks Pembangunan Manusia tidak ada perbedaan yang signifikan antara Kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten induk, dan Kabupaten Way Kanan sebagai Kabupaten yang dimekarkannya, namun pada Jumlah penduduk Miskin terdapat perbedaan yang signifikan antara kabupaten lampung utara utara sebagai kabupaten induk dan kabupaten Lampung Utara sebagai Kabupaten yang dimekarkan.

B. Saran

Untuk Mensukseskan sistem Otonomi daerah, pemerintah pusat harus melakukan kajian mendalam terkait izin untuk pemekaran wilayah, sehingga dengan dimekarkannya wilayah untuk mencapai tujuan pemekaran wilayah yaitu kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, bukan menjadikan atau mematikan kabupaten induk ataupun kabupaten yang menjadi pecahannya, Kabupaten Lampung Utara yang sudah 20 tahun dimekarkan dengan kabupaten Way Kanan tidak ada perbedaan signifikan dengan Kabupaten Way Kanan Maka Kabupaten

Lampung Utara harus mampu memperbaiki keadaannya dan mengoptimalkan seluruh Potensi wilayah yang dimiliki agar tidak tertinggal oleh kabupaten yang di mekarkannya, sebagai dampak dari pemekaran wilayah..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. Kajian Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat). Thesis Program Studi Ilmu-ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah dan perdesaan Institut Pertanian Bogor. <http://repository.ipb.ac.id>. 2011.
- Anonim. 2008. Menyimak Penurunan Angka Kemiskinan. <http://PNPMmandiri.org>.
- Ajdaoake. 2012. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. <http://ajdaoake.wordpress.com>.
- Arikunto, Suharsimi. 1997, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta : Jakarta
- Idodo, T. Perencanaan Pembangunan : Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah). UPP STIM YKPN. Yogyakarta. 2006.
- Ismawan, Hendra. 2002, Ranjau-Ranjau Otonomi Daerah. Pondok Edukasi : Solo
- Khalid, T. M. Otonomi Daerah : Tujuan Pemekaran dan Penggabungan Daerah. <http://tengkumahesakhalid.blogspot.com>.
- Kuncoro, M. Ekonomi Pembangunan. UPP AMP YKPN. Yogyakarta. 2003.
- Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2019
- Koentjaraningrat, 1990. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Gajah Mada University Press : Jogjakarta.
- Nawawi, Hadari. 1998, Metode Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University : Yogyakarta.
- Nurcholis, Hanif. 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah Grasindo :Jakarta

Peraturan Menteri dalam Negeri no 86 Tahun 2018
Poernomo, Mangku. 2004, *Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*. Laperia Pustaka Utama : Yogyakarta.

Rasyid, Riyaas. 1997, *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan dan Politik Orde Baru*. Pustaka Pelajar : Jakarta.

RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2014-2019

Salim, Peter. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Modern English Press : Jakarta

Silalahi, Ulber. 2009, *Metode Penelitian Sosial*. PT. Rafika Aditama : Bandung
Widarta, I. 2005, *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Pondok Edukasi : Bantul
Wahyudi, dkk. 2002, *Etnis Pakpak dan Fenomena Pemekaran Wilayah*.

Tambunan, T. *Perekonomian Indonesia, Beberapa Masalah Penting*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. 412 halaman.

Yayasan Sada Ahmo : Sidikalang
(http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah. Diakses 21 Mei 2018, pukul 18.00 Wib).

(http://www.dsfindonesia.org/userfiles/Studi_Evaluasi_Pemekaran_Daerah. Diakses pada 21 mei 2018 20.32 Wib)

(<http://imrodili.ulayat.com/2009/12/dampak-kebijakan-pemekaran-wilayah>. Diakses pada tanggal 22 Mei pukul 12.09 Wib).

www.depsos.go.id/UU.kessosNo112009. Diakses pada tanggal 22 mei pukul 18.00 Wib.)

(<http://tobalilo80.blogspot.com/2009/01/pengembangan-kecamatan.html>. Diakses pada tanggal 22 mei pukul 18.30 Wib).

(http://Badan_Pusat_Statistik/2009/Pemkab_Lampung_Utara. Diakses pada tanggal 23 Mei pukul 11.30 Wib).